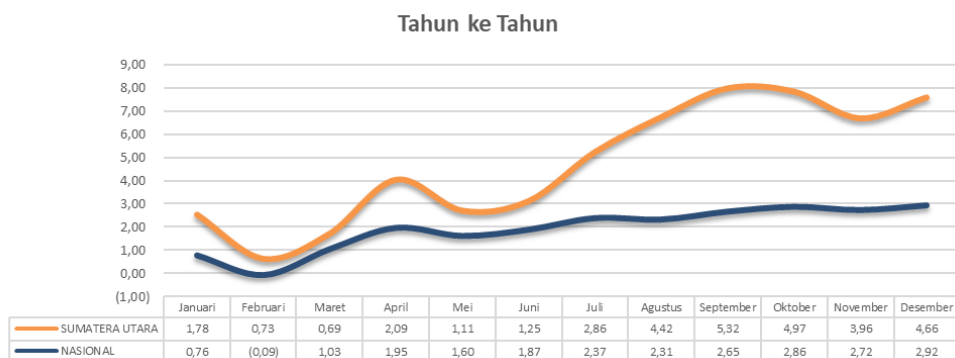


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan tingkat inflasi pada suatu daerah provinsi dapat dilihat dari Indeks Harga Konsumen (IHK). Provinsi Sumatera Utara memiliki 8 (delapan) daerah IHK yang dapat dijadikan acuan perkembangan tingkat inflasi, yaitu Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Padangsidimpuan, Gunungsitoli, Deli Serdang, Karo dan Labuhanbatu. Pada Triwulan-IV seluruh daerah IHK di Provinsi Sumatera Utara pada bulan Oktober 2025 tercatat inflasi (yoy) sebesar 4,97 persen, bulan November 2025 mengalami inflasi sebesar 3,96 persen dan bulan Desember 2025 mengalami inflasi sebesar 4,66 persen. Adapun perkembangan inflasi itu dapat dilihat data BPS Provinsi Sumatera Utara mulai Oktober sampai dengan Desember 2025 yang antara lain:

NO	BULAN	INFLASIMonth to Month	INFLASI TAHUN KALENDER	INFLASIYear on Year
1	OKTOBER			
	SUMATERA UTARA	-0,20	3,39	4,97
	NASIONAL	0,28	2,10	2,86
2	NOVEMBER			
	SUMATERA UTARA	-0,42	2,96	,96
	NASIONAL	0,17	2,27	2,72
3	DESEMBER			
	SUMATERA UTARA	1,66	4,66	4,66
	NASIONAL	0,46	2,92	2,92

Grafik Perkembangan Inflasi Sumatera Utara (mengacu pada 8 Daerah IHK Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Padangsidimpuan, Sibolga, Gunung Sitoli, Deli Serdang, Karo dan Labuhanbatu)



- a. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Oktober 2025, antara lain: cabai merah, emas perhiasan, ikan dencis, beras, bawang merah, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, daging ayam ras, wortel, kelapa, akademi/perguruan tinggi, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, cabai hijau, Sigaret Kretek Mesin (SKM), minyak goreng, pemeliharaan/service, telur ayam ras, Sigaret Kretek Tangan (SKT), mie, kontrak rumah, dan kentang. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y pada Oktober 2025 antara lain: bawang putih, angkutan udara, sabun detergen bubuk, daging babi, bayam, sabun cair/cuci piring, brokoli, pisang, pengharum cucian/pelembut, sawi hijau, ikan mujair, sawi putih/pecay/pitsai, terong, popok bayi sekali pakai, anggur, pembasmi nyamuk spray, jeruk, celana panjang jeans anak, kembang kol, dan tulang sapi. nflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks dari sebagian besar kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,58 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,31 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,79 persen; kelompok kesehatan sebesar 4,06 persen; kelompok transportasi sebesar 1,48 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,40 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,70 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,82 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,57 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 13,03 persen. Sementara kelompok yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,38 persen.
- b. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada November 2025, antara lain: cabai merah, emas perhiasan, beras, ikan dencis, daging ayam ras, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, wortel, akademi/perguruan tinggi, kelapa, bawang merah, telur ayam ras, pemeliharaan/service, Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), cabai rawit, cabai hijau, kangkung, kontrak rumah, dan ketupat/lontong sayur. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y pada

November 2025 antara lain: tomat, bawang putih, daging babi, brokoli, sabun detergen bubuk, sabun cair/cuci piring, pisang, terong, buah naga, ikan mujair, popok bayi sekali pakai, pengharum cucian/pelembut, pembasmi nyamuk spray, sawi putih/pecay/pitsai, anggur, alpukat, pir, susu bubuk untuk balita, tembakau, dan jengkol. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks dari sebagian besar kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,52 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,73 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,68 persen; kelompok kesehatan sebesar 4,02 persen; kelompok transportasi sebesar 2,27 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,39 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,72 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,82 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,15 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 13,12 persen. Sementara kelompok yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,23 persen.

- c. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Desember 2025, antara lain: emas perhiasan, cabai merah, bawang merah, cabai rawit, beras, kelapa, ikan dencis, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, daging ayam ras, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, akademi/perguruan tinggi, telur ayam ras, wortel, kangkung, Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM), cabai hijau, kacang panjang, kontrak rumah, dan bayam. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y pada Desember 2025 antara lain: tomat, bawang putih, jengkol, kentang, daging babi, sabun detergen bubuk, popok bayi sekali pakai, angkutan udara, sabun cair/cuci piring, detergen cair, anggur, telepon seluler, buah naga, tembakau, pembasmi nyamuk spray, susu cair kemasan, pir, ikan mujair, susu bubuk untuk balita, dan ikan teri. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks dari sebagian besar kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 8,44 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,57 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,71 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,15 persen; kelompok transportasi sebesar 1,37 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,71 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,82 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,43 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 14,83 persen. Sementara kelompok yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,28 persen dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen.

- d. Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya. Dari hasil monitoring dan survey beberapa komoditas bahan pokok di 33 Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara sejak bulan Oktober s.d Desember 2025, diperoleh data sebagai berikut:

KOMODITI	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Beras Medium	Rp14.539/kg	Rp14.311/kg	Rp14.560/kg
Jagung Pipilan	Rp7.126/kg	Rp7.494/kg	Rp7.580/kg
Bawang Merah	Rp34.149/kg	Rp33.053/kg	Rp45.920/kg
Bawang Putih	Rp34.689/kg	Rp34.002/kg	Rp37.603/kg
Cabai Merah Keriting	Rp76.827/kg	Rp53.611/kg	Rp57.498/kg
Cabai Rawit Hijau	Rp33.210/kg	Rp30.478/kg	Rp68.730/kg
Daging Sapi Murni	Rp132.077/kg	Rp127.323/kg	Rp132.179/kg

KOMODITI	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Daging Ayam Broiler	Rp34.568/kg	Rp34.860/kg	Rp39.948/kg
Telur Ayam Ras	Rp29.252/kg	Rp29.557/kg	Rp33.339/kg
Gula Pasir	Rp17.899/kg	Rp17.759/kg	Rp18.148/kg
Minyak Goreng Curah	Rp18.004/Ltr	Rp17.836/Ltr	Rp18.456/Ltr
Minyak Goreng Premium	Rp21.774/Ltr	Rp21.491/Ltr	Rp21.581/Ltr
Minyakita	Rp17.005/Ltr	Rp16.670/Ltr	Rp17.830/Ltr
Ikan Kembung	Rp44.005/kg	Rp44.932/kg	Rp46.986/kg
Tempe	Rp16.046/kg	Rp16.046/kg	Rp16.607/kg
Tepung Terigu Protein Sedang	Rp13.908/kg	Rp12.989/kg	Rp13.221/kg
Indomie Kari Ayam	Rp3.225/kg	Rp3.273/kg	Rp3.328/kg
Udang Laut Segar	Rp82.328/kg	Rp81.853/kg	Rp85.825/kg
Tahu Mentah	Rp10.864/kg	Rp10.814/kg	Rp11.321/kg
Pisang Barangan	Rp11.679/kg	Rp11.750/kg	Rp12.125/kg
Jeruk Manis	Rp16.048/kg	Rp16.650/kg	Rp16.938/kg
Susu Bubuk Balita	Rp44.508/ktk	Rp44.289/ktk	Rp44.371/ktk

Berdasarkan data di atas diperoleh informasi bahwa selama triwulan-III sebagian besar harga-harga komoditas bahan pokok mengalami eskalasi dan cenderung mengalami fluktuasi. Sementara pada bulan Oktober sampai Desember sebagian kecil komoditas mengalami penurunan harga cukup signifikan antara lain aneka bawang putih, daging sapi murni, gula pasir, minyak goreng premium, ikan kembung, indomie kari ayam, udang laut segar, tahu mentah dan susu bubuk balita. Hal ini mengindikasikan kemampuan dan daya beli masyarakat menurun walaupun ketersediaan pasokan terjamin.

RESIKO KE DEPAN

1. Risiko terhadap ketersediaan dan stabilitas harga komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang, gula pasir, minyakita, daging ayam, daging sapi, dan telur ayam ras tetap menjadi perhatian utama menjelang Triwulan-I 2026. Pada awal tahun, Sumatera Utara memasuki puncak musim penghujan yang dapat menurunkan produksi di sentra hortikultura serta mengganggu distribusi, sehingga berpotensi menimbulkan tekanan inflasi terutama pada kelompok *volatile food*.
2. Kondisi produksi beras juga perlu diwaspadai karena Triwulan-I umumnya berada pada fase jeda sebelum panen raya. Penurunan ketersediaan beras lokal di wilayah lumbung pangan seperti Deli Serdang, Langkat, dan Serdang Bedagai dapat mendorong kenaikan harga, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi di awal tahun.
3. Selain itu, pola konsumsi pasca libur akhir tahun, awal semester sekolah, serta persiapan menuju Ramadhan dan Hari Raya Idul fitri 2026 mulai memicu peningkatan permintaan sejak akhir Triwulan-I. Berdasarkan pengalaman Ramadhan 2024, kebutuhan beras, gula, minyak goreng, daging, telur, serta komoditas bumbu mengalami kenaikan signifikan 4 sampai 6 minggu sebelum puasa, sehingga antisipasi pasokan perlu dilakukan lebih awal.
4. Ketergantungan beberapa komoditas pada pasokan luar daerah juga meningkatkan risiko bila terjadi hambatan cuaca, perlambatan distribusi, atau penyesuaian harga nasional. Risiko ini dapat berdampak pada komoditas seperti gula pasir, bawang putih, dan minyak goreng, yang selama ini sangat dipengaruhi kondisi pasokan di luar

Sumatera Utara.

5. Untuk mengantisipasi tekanan harga menjelang Ramadhan, diperlukan penguatan langkah stabilisasi melalui GPM/operasi pasar, pemetaan dan optimalisasi stok Bulog, percepatan tanam di sentra produksi, serta koordinasi intensif dengan distributor dan pelaku logistik. Upaya ini penting untuk menjaga kelancaran suplai dan mengendalikan ekspektasi inflasi pada Triwulan-I menuju Triwulan-II 2026.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI SUMATERA UTARA

Tekanan Inflasi Pasca Nataru dan Penyesuaian Harga di Awal Tahun

- a. Memasuki awal tahun 2026 (Triwulan I), tekanan inflasi di Sumatera Utara masih dipengaruhi oleh **dampak lanjutan periode Natal dan Tahun Baru (Nataru)** serta proses **penyesuaian harga pasca puncak permintaan akhir tahun**.
- b. Meskipun permintaan rumah tangga cenderung mengalami normalisasi, harga sejumlah komoditas pangan strategis seperti **cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, beras, minyak goreng, daging ayam ras, telur ayam ras, dan daging sapi** belum sepenuhnya kembali ke level normal akibat keterbatasan pasokan dan gangguan distribusi.
- c. Selain itu, komoditas non-pangan seperti **tarif angkutan, jasa pariwisata, serta harga emas perhiasan** masih memberikan kontribusi terhadap inflasi awal tahun, seiring dengan berlanjutnya penyesuaian tarif, tingginya biaya operasional, dan volatilitas harga global. **Curah hujan yang relatif tinggi pada awal tahun** serta penataan ulang jadwal distribusi pasca libur panjang turut menjadi faktor yang menahan penurunan harga secara cepat.

Keterbatasan Infrastruktur Pengelolaan dan Penyimpanan Pangan pada Awal Tahun

- a. Pada Triwulan I 2026, **keterbatasan infrastruktur pengelolaan pascapanen**, khususnya **Cold Storage/CAS dan sistem rantai dingin**, masih menjadi kendala utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Ketiadaan fasilitas penyimpanan yang memadai pada BUMD maupun OPD teknis menyebabkan komoditas hortikultura hasil panen akhir tahun dan awal tahun tidak dapat ditampung secara optimal.
- b. Kondisi ini berdampak pada **menipisnya stok penyangga** ketika produksi terganggu oleh cuaca penghujan atau pergeseran musim tanam, sehingga harga komoditas hortikultura dan protein hewani menjadi mudah berfluktuasi pada awal tahun, meskipun tekanan permintaan relatif lebih rendah dibanding periode Nataru

Tantangan Struktural dalam Produksi dan Rantai Pasok pada Triwulan I 2026

Memasuki awal tahun, sejumlah persoalan struktural masih menjadi faktor risiko pengendalian inflasi, antara lain:

- a. **Inefisiensi struktur pasar pangan**, di mana konsentrasi pedagang dan distributor tertentu tetap mempengaruhi pembentukan harga, terutama saat pasokan belum pulih sepenuhnya pasca Nataru.

Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah untuk komoditas strategis seperti bawang putih, gula pasir, minyak goreng, serta sebagian hortikultura, yang meningkatkan kerentanan inflasi ketika distribusi terhambat akibat cuaca ekstrem dan penyesuaian arus logistik awal tahun.

- c. **Rantai pasok dan sistem logistik yang belum efisien**, ditandai dengan tingginya biaya transportasi, keterbatasan armada pengangkut berstandar, serta penyesuaian tarif logistik pasca akhir tahun, sehingga harga pangan tetap sensitif terhadap perubahan biaya distribusi.
- d. **Infrastruktur pendukung yang belum optimal**, termasuk kerusakan jalan produksi akibat intensitas hujan, keterbatasan kapasitas gudang, serta belum terintegrasinya sentra distribusi pangan antarwilayah kabupaten/kota.
- e. **Kesenjangan dan keterlambatan informasi pasar**, khususnya terkait data stok, harga, dan distribusi antarwilayah, yang membatasi kemampuan pemerintah daerah melakukan respons cepat dan terukur pada awal tahun.
- f. **Keterbatasan kapasitas produksi awal tahun**, yang dipengaruhi oleh gangguan cuaca, pergeseran musim tanam, serta adopsi teknologi budidaya yang masih terbatas, sehingga suplai pangan belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan pasar secara berkelanjutan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI SUMATERA UTARA

- 1. (13 Oktober 2025) Rapat teknis pasokan pangan untuk MBG.
- 2. (17 Oktober 2025) Upaya pengendalian inflasi menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2026 melalui Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara No. 500.1.3.2/9696.
- 3. (19 Oktober 2025) Pembelian cabai merah dari Kabupaten Jember, Jawa Timur sebanyak 50 ton (tiga tahap).
- 4. (22 Oktober 2025) TPID Provsu menggelar operasi pasar cabai merah.
- 5. (22 Oktober 2025) Monitoring ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga beras medium dan premium bersama Satgas Pangan, Bapanas, dan TPID Provsu.
- 6. (7 November 2025) Rapat perkembangan harga pakan ternak dan langkah-langkah stabilisasi harga serta koordinasi dengan pelaku usaha.
- 7. (7 November 2025) Rapat koordinasi pendistribusian minyak goreng menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru.
- 8. (25 November 2025) Gerakan tanam cabai merah bersama Kelompok Tani Mekar Indah di Desa Bulan-bulan, Kab. Batubara.
- 9. (27 November 2025) Pasar murah menjelang HBKN Nataru 2026 di Kab. Serdang Bedagai, Batu Bara, dan Kota Tebing Tinggi.
- 10. (18 Desember 2025) Sidak Pasar menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru di pimpin langsung oleh gubernur sumut ke pasar tradisional sei sikambing dan suka ramai medan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga.
- 11. (31 Desember 2025) Monitoring Harga menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru dilaksanakan TPID Provsu dipimpin Pimpinan Perum Bulog Kanwil Sumut ke Pasar Tradisional Sukaramai medan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

b.

EVALUASI KEBIJAKAN

1. Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan

Pelaksanaan **Gelar Pangan Murah (GPM)** dan optimalisasi **Toko Tani Indonesia (TTI)** terbukti berperan dalam menahan laju kenaikan harga komoditas pangan strategis selama periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Memasuki awal tahun 2026, kebijakan stabilisasi tersebut tetap relevan sebagai instrumen **penjaga kestabilan harga pasca puncak konsumsi**, khususnya pada komoditas hortikultura dan protein hewani yang masih mengalami penyesuaian harga. Ke depan, cakupan wilayah, frekuensi pelaksanaan, serta ketepatan waktu intervensi perlu terus diperluas dan disesuaikan dengan dinamika pasokan awal tahun.

2. Penguatan Produksi dan Infrastruktur Pangan

Evaluasi pelaksanaan penguatan produksi menunjukkan bahwa **volatilitas pasokan hortikultura** masih tinggi pada akhir tahun dan berdampak hingga awal tahun berikutnya. Oleh karena itu, pada Triwulan I 2026 diperlukan percepatan penguatan **efisiensi produksi**, penyesuaian **pola tanam**, serta peningkatan kesiapan **infrastruktur distribusi dan pascapanen**, termasuk **cold storage dan Controlled Atmosphere Storage (CAS)**. Perbaikan manajemen **supply-demand** menjadi krusial untuk mengurangi fluktuasi harga pada periode awal tahun ketika produksi belum sepenuhnya pulih.

3. Peningkatan Cadangan Pangan dan Kebijakan Impor Terukur

Kebijakan **Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)** berkontribusi positif dalam menjaga ketersediaan pangan strategis pada akhir tahun. Namun demikian, evaluasi awal tahun 2026 menunjukkan perlunya **penguatan cadangan pangan non-beras**, terutama untuk komoditas hortikultura dan protein hewani yang rentan terhadap gangguan cuaca. Selain itu, **kebijakan impor komoditas tertentu** seperti beras, bawang, dan gula perlu dilakukan secara **terukur, tepat waktu, dan berbasis data**, guna menjaga keseimbangan stok dan mencegah tekanan harga berlebihan pada awal tahun.

4. Penguatan Kelembagaan, Rantai Pasok, dan Kerja Sama Antar Daerah

Penguatan kelembagaan petani, pemanfaatan **platform digital dan e-commerce pertanian**, serta perluasan **Kerja Sama Antar Daerah (KAD)** terbukti mampu meningkatkan efisiensi distribusi pangan dan menekan disparitas harga pada periode akhir tahun. Pada awal tahun 2026, kebijakan ini perlu terus dilanjutkan dan diperkuat untuk memastikan **kelancaran pasokan lintas wilayah**, terutama ketika produksi lokal belum optimal. Sinergi antar pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga secara berkelanjutan.

5. Peningkatan Komunikasi Publik dan Kualitas Data

Evaluasi menunjukkan bahwa **komunikasi kebijakan yang konsisten dan terkoordinasi** berperan penting dalam menjaga ekspektasi inflasi masyarakat, khususnya pada periode kenaikan harga musiman. Memasuki awal tahun 2026, diperlukan penguatan **strategi komunikasi publik** yang menekankan kondisi pasokan, langkah stabilisasi yang dilakukan pemerintah, serta proyeksi harga ke depan. Di sisi lain, **peningkatan kualitas dan keterpaduan data harga, stok, dan distribusi** menjadi prasyarat utama dalam mendukung

pengambilan kebijakan yang cepat, tepat, dan berbasis bukti.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Penguatan Produksi dan Hulu Pertanian

- a. **Mendorong koorporatisasi petani** melalui skema penjaminan kredit, penyertaan modal, dan subsidi berbasis risiko bekerja sama dengan **Jamkrida Sumatera Utara**, guna meningkatkan skala usaha, akses pembiayaan, dan keberlanjutan pasokan komoditas pangan strategis.
- b. **Percepatan adopsi teknologi pertanian presisi** seperti fertigasi, *drone spraying*, pengaturan debit air, serta pemanfaatan rekomendasi iklim dan cuaca, khususnya untuk komoditas **cabai, bawang, dan hortikultura sensitif**, guna meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, dan keseragaman hasil pada Triwulan I 2026.

Stabilitas Harga & Ketersediaan Pangan

- a. **Penguatan monitoring stok dan harga** secara harian dan mingguan bersama **Satgas Pangan, Bulog, dan distributor**, sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi peningkatan permintaan pada periode **Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah**.
- b. **Pelaksanaan Operasi Pasar (OP)** secara rutin, terjadwal, dan berbasis peta kerawanan harga, baik di pasar tradisional maupun modern, khususnya untuk komoditas **beras, gula pasir, minyak goreng, cabai, dan bawang**.
- c. **Melanjutkan dan memperluas Gerakan Sumut Menanam** sebagai upaya memperkuat pasokan lokal sepanjang Triwulan I 2026 serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

Kelancaran Distribusi dan Logistik

- a. **Menjamin kelancaran distribusi pangan** melalui optimalisasi kerja sama dengan **penyedia transportasi daring, marketplace, dan jaringan logistik regional**, guna menekan biaya distribusi dan memitigasi potensi gangguan cuaca ekstrem pada awal tahun.
- b. **Fasilitasi dan penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD)** sebagai sumber pasokan alternatif ketika terjadi defisit komoditas di tingkat kabupaten/kota, terutama untuk komoditas hortikultura dan pangan strategis.

Transformasi Digital dan Efisiensi Rantai Pasok

- a. **Mendorong digitalisasi pemasaran dan perdagangan pangan**, guna memperkecil disparitas harga antara produsen dan konsumen, menekan asimetri informasi harga di tingkat petani, serta memperluas akses pasar.
- b. **Penguatan sistem ketelusuran produk (*traceability*)**, khususnya untuk komoditas unggulan Sumatera Utara, guna meningkatkan efisiensi rantai pasok dan daya saing di pasar domestik maupun ekspor.

Intervensi Demand Side & Perilaku Konsumen

- a. **Pelaksanaan edukasi publik dan kampanye belanja bijak**, anti-*panic buying*, serta pemanfaatan belanja daring secara terencana untuk menjaga stabilitas permintaan selama periode **HBKN Ramadan-Idulfitri**.
- b. **Optimalisasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)** melalui gerakan tanam di **pekarangan rumah, sekolah, panti asuhan, pesantren, dan lingkungan masyarakat**, guna memperkuat kemandirian pangan dan ketahanan rumah tangga.

Penguatan Data & Koordinasi Kebijakan

- a. **Peningkatan akurasi dan integrasi data** surplus-defisit komoditas, produksi, stok, dan distribusi sebagai dasar perencanaan intervensi pengendalian inflasi; serta optimalisasi fungsi **Tim KAD** sebagai pusat data dan koordinasi pasokan antarwilayah.
- b. **Penguatan koordinasi TPID Provinsi dengan TPID Kabupaten/Kota** melalui forum rutin dan mekanisme *early warning system*, guna mempercepat respon kebijakan serta memastikan seluruh program pengendalian inflasi berjalan terpadu dan berkesinambungan sepanjang tahun 2026.